
Transformasi Pembelajaran Nonformal bagi Lansia: Analisis Implementasi Program Selantang di Kecamatan Nganjuk

Sindy Triana Putri¹, Bagus Nuari Harmawan²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik

Email Korenspondensi : sndytriana@gmail.com

Diterima	27	November	2025
Disetujui	24	Desember	2025
Dipublish	12	Desember	2025

Abstract

The growth of the elderly population in Indonesia presents new challenges in providing non-formal education services that can enhance the quality of life for this vulnerable group. The Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) program developed by BKKBN is an important innovation in lifelong learning designed to strengthen the physical, mental, social, and spiritual resilience of older adults. This study aims to analyze the effectiveness of the Selantang Program in Nganjuk District using George C. Edward III's policy implementation model as the primary analytical framework. The research employs a descriptive qualitative approach with data collected through observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal that the implementation of Selantang has had a significant impact on improving emotional health, cognitive abilities, and social engagement among participants, particularly through interactive activities such as group discussions, educational games, and physical training. However, several challenges remain, especially in communication among implementers, limited funding, inadequate learning facilities, and weak cross-sectoral coordination. Nevertheless, the strong commitment of cadres and family planning counselors has proven to be a key factor in the program's success. By strengthening institutional synergy and increasing support from local governments, the Selantang Program has the potential to become a leading model of non-formal education for older adults at both regional and national levels.

Keywords: *Selantang Program, Policy Implementation, Quality of Life, Elderly Empowerment*

Abstrak

Pertumbuhan populasi lanjut usia di Indonesia menghadirkan tantangan baru dalam penyediaan layanan pendidikan nonformal yang mampu meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan tersebut. Program Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) yang dikembangkan BKKBN merupakan inovasi penting dalam pembelajaran sepanjang hayat yang dirancang untuk meningkatkan ketangguhan fisik, mental, sosial, dan spiritual lansia. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program Selantang di Kecamatan Nganjuk dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai kerangka analisis utama. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Selantang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesehatan emosional, kemampuan kognitif, serta keterlibatan sosial peserta, terutama melalui kegiatan interaktif seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, dan pelatihan fisik. Namun,



sejumlah hambatan masih muncul, terutama pada aspek komunikasi antar pelaksana, keterbatasan anggaran, kekurangan fasilitas pembelajaran, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Meskipun demikian, tingginya komitmen kader dan penyuluh KB menjadi faktor penentu keberhasilan program. Dengan memperkuat sinergi antar lembaga dan meningkatkan dukungan pemerintah daerah, program ini berpotensi menjadi model pembelajaran nonformal unggulan bagi lansia di tingkat regional maupun nasional.

Kata kunci: *Program Selantang, Implementasi Publik, Kualitas Hidup, Pemberdayaan Masyarakat*

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan mencerminkan fenomena global *ageing population*. World Population Review (2023) melaporkan bahwa populasi dunia telah mencapai 8,2 miliar jiwa, sementara Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia memiliki 282,4 juta jiwa pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan sekitar 1 persen per tahun (Tuwu & La Tarifu, 2023). Sejalan dengan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tersebut diprediksi melampaui 320 juta jiwa pada 2045, bertepatan dengan agenda Indonesia Emas yang menekankan peningkatan kualitas hidup manusia dalam seluruh siklus kehidupannya (Badan Pusat Statistik, 2023). Dinamika demografis tersebut menuntut adanya kebijakan pembangunan yang responsif dan inklusif, khususnya bagi lansia yang menghadapi penurunan fisik, psikologis, dan sosial (Daryanto, Agustin, & Pongtuluran, 2023).

Penuaan penduduk membawa tantangan besar dalam pemenuhan layanan kesehatan, dukungan sosial, dan kesempatan pembelajaran bagi lansia. Kesepian dan berkurangnya interaksi sosial terbukti menurunkan kualitas hidup dan kesehatan mental kelompok ini (Kartika, Barmawi, & Yuningsih, 2024).

Dalam hal ini peran penting pemerintah daerah terletak pada upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang menjadi hal sangat penting dan dibutuhkan. Oleh karena

itu, diperlukan peningkatan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, tidak hanya sebatas infrastruktur, melainkan juga memberikan motivasi dan akses agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam program yang diharapkan masyarakat akan mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah di masa mendatang (Rahmad, Febriansyah, & Priambodo, 2024).

Dalam konteks tersebut, pendidikan nonformal menjadi instrumen strategis untuk memperkuat partisipasi sosial lansia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pemerintah juga menegaskan komitmennya melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan yang mendorong upaya pemberdayaan lansia secara terpadu.

Sebagai tindak lanjut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Program Bangga Kencana menghadirkan kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) serta mengembangkan inovasi Sekolah Lansia Tangguh (Selantang), sebuah model pembelajaran nonformal berbasis pendidikan sepanjang hayat (Yuswantina, Vifta, & Susilo, 2019). Selantang bertujuan mewujudkan lansia SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif, dan Bermartabat) melalui penguatan tujuh dimensi lansia tangguh yang meliputi aspek fisik, mental, sosial, spiritual, dan lingkungan.

Provinsi Jawa Timur menjadi pelaksana awal program ini sejak 2022 dan tercatat memiliki



jumlah penduduk lansia terbesar kedua di Indonesia, yaitu sekitar 5,76 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023). Namun, persebaran kelas Selantang belum merata. Data Golantang BKKBN tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 225 kelas yang tersebar di 18 kabupaten/kota, Kabupaten Nganjuk hanya memiliki 6 kelas aktif, menjadikannya salah satu wilayah dengan cakupan terendah.

Meskipun demikian, Nganjuk justru mampu mencapai implementasi hingga Standar 3, jenjang tertinggi kurikulum Selantang. Kondisi ini menggambarkan adanya gap antara rendahnya kuantitas penyebaran program dan tingginya kualitas implementasi pada beberapa kelas. Temuan tersebut selaras dengan penelitian sebelumnya, seperti (Windani & Rosdiana, 2025), yang mencatat bahwa keterbatasan anggaran, fasilitas, dan sosialisasi menjadi hambatan umum implementasi Selantang di berbagai daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Selantang di Kecamatan Nganjuk guna mengidentifikasi faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Untuk menganalisis fenomena tersebut secara komprehensif, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyoroti empat variabel utama komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai komponen penentu keberhasilan sebuah kebijakan publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling* sebagai teknik penentuan informan. Pada penelitian ini menggunakan analisis data

dengan melakukan pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian hasil dan pembahasan ini menyajikan temuan utama penelitian mengenai efektivitas Program Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) di Kecamatan Nganjuk dalam kerangka transformasi pendidikan nonformal bagi lansia. Program Selantang, yang dikembangkan oleh BKKBN, pada dasarnya merupakan inovasi pelayanan pembelajaran sepanjang hayat yang dirancang untuk meningkatkan ketangguhan fisik, mental, spiritual, dan sosial lansia melalui pendekatan edukasi terstruktur.

Di Kabupaten Nganjuk, program ini diintegrasikan dengan kegiatan penyuluhan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur seperti kader, penyuluh KB, pemerintah desa, serta para relawan pembelajaran. Secara umum, kegiatan Selantang di Nganjuk meliputi kelas peningkatan kesehatan fisik, pelatihan kognitif, penguatan psikososial, spiritualitas, serta aktivitas kelompok yang bertujuan memperluas jejaring sosial dan meningkatkan kualitas hidup lansia.

Hasil penelitian dianalisis berdasarkan kerangka implementasi kebijakan George C. Edward III yang dikutip dalam (Situmorang, 2016), yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi sejauh mana kejelasan komunikasi antar pelaksana, ketersediaan sumber daya manusia dan sarana, komitmen serta sikap pelaksana program, dan kondisi



organisasi pendukung telah berkontribusi terhadap keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan Selantang di Nganjuk.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa dinamika pelaksanaan program cukup beragam, mencerminkan kombinasi antara faktor pendukung seperti tingginya antusiasme kader dan partisipasi lansia serta sejumlah kendala, seperti terbatasnya fasilitas pembelajaran dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, uraian berikut menggambarkan bagaimana variabel-variabel tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi efektivitas implementasi Selantang sebagai upaya strategis dalam penguatan pendidikan nonformal bagi lansia di Kabupaten Nganjuk. Berikut ini hasil dan pembahasan dari empat variabel Edward III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi :

1. Komunikasi

Menurut Edward III dikutip dalam (Situmorang, 2016) , komunikasi yang efektif diperlukan agar kebijakan dapat diteruskan dengan baik dari pembuat keputusan hingga pelaksana di lapangan. Komunikasi menjadi faktor penting dalam efektivitas implementasi Program Selantang di Kecamatan Nganjuk. Mengacu pada model Edward III (Situmorang 2016), keberhasilan kebijakan bergantung pada bagaimana pesan kebijakan ditransmisikan, sejauh mana informasi disampaikan dengan jelas, dan bagaimana konsistensi komunikasi dijaga antar pelaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi informasi di tingkat kelurahan telah berjalan cukup efektif, terutama di Kelurahan Begadung, Keramat, dan Jatirejo. Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan koordinator program, Bapak Agus Tedjo, yang menjelaskan bahwa sosialisasi rutin dilakukan

melalui posyandu lansia sehingga peserta memahami tujuan dan manfaat Selantang. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian (Windani & Rosdiana, 2025) yang menemukan bahwa komunikasi langsung antara kader dan lansia meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Kejelasan komunikasi juga terlihat dari penggunaan juknis, SOP, serta rapat koordinasi berkala yang menjadi acuan pelaksana. Kader menyampaikan bahwa setiap perubahan kebijakan selalu diinformasikan melalui rapat monitoring bulanan, sehingga mereka tidak mengalami kebingungan dalam menjalankan kegiatan. Mekanisme ini mencerminkan pandangan Van Horn dan Van Meter dalam (Boreel, Meigawati, & Amirulloh, 2022) bahwa kejelasan antar tingkatan birokrasi penting untuk menjaga keseragaman implementasi. Temuan ini juga didukung oleh wawancara dengan penyuluh Dinas PPKB yang menegaskan bahwa seluruh pedoman Selantang mengacu pada Keputusan Deputi KSPK BKKBN Nomor 15/KEP.KSPK/F3/2024.

Dari aspek konsistensi, komunikasi di tingkat kecamatan masih menghadapi hambatan. Ibu Anne dari Dinas PPKB menjelaskan bahwa keterbatasan tenaga penyuluh menyebabkan pembinaan hanya dapat dilakukan rutin di beberapa kecamatan seperti Nganjuk dan Jaticalen. Kondisi ini berpengaruh pada perbedaan pemahaman pelaksana antar kecamatan, sebagaimana dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa inkonsistensi instruksi dapat menghambat efektivitas kebijakan. Meskipun demikian, wilayah pelaksana aktif tetap menunjukkan konsistensi komunikasi melalui rapat rutin dan penggunaan juknis yang sama, sehingga kegiatan dapat berjalan stabil.

Secara keseluruhan, komunikasi dalam Program Selantang di Kecamatan Nganjuk



sudah berjalan baik di wilayah pelaksana, ditandai dengan transmisi informasi yang rutin, kejelasan pedoman, dan konsistensi koordinasi. Namun, hambatan di tingkat kabupaten masih perlu ditangani melalui peningkatan jumlah penyuluh, perluasan pembinaan, dan penguatan strategi sosialisasi agar kualitas komunikasi lebih merata di seluruh wilayah Nganjuk.

2. *Sumber Daya*

Sumber daya merupakan unsur yang sangat menentukan efektivitas implementasi Program Selantang di Kecamatan Nganjuk. Dalam model Edward III (Situmorang, 2016), keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecukupan staf, informasi, kewenangan, serta fasilitas yang menunjang pelaksanaan program. Di Kecamatan Nganjuk, kondisi sumber daya yang tidak merata menjadi faktor yang membedakan kualitas kegiatan pada tiap wilayah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pelaksana, dukungan anggaran, serta karakteristik peserta lansia memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas program, dan keterbatasan tersebut sering kali berkaitan dengan variabel komunikasi, disposisi, serta struktur birokrasi dalam kerangka implementasi kebijakan. Pada aspek sumber daya manusia pelaksana, kader Selantang di wilayah kelurahan maupun desa memiliki latar pendidikan yang beragam. Sebagian besar bukan berasal dari latar belakang kesehatan, namun mereka berupaya memahami materi melalui modul, buku panduan, dan pendampingan dari penyuluh.

Hal ini memperlihatkan bahwa kejelasan informasi menjadi variabel penting dalam mendukung kompetensi kader. Seperti disampaikan kader Kelurahan Begadung Bu Gina, mereka sering mempelajari panduan secara bersama-sama agar pemahaman lebih

seragam, sehingga pelaksanaan kegiatan lebih terarah. Koordinator Selantang Kecamatan Nganjuk, Bapak Agus Tedjo, juga menegaskan bahwa para kader telah mendapatkan pelatihan dasar dari Dinas PPKB dengan dukungan organisasi profesi seperti IBI, IDI, dan PDGI untuk memperkuat pengetahuan tentang kesehatan lansia.

Temuan ini mempertegas bahwa kapasitas SDM cukup baik, tetapi tetap membutuhkan penguatan berkelanjutan agar ketidakseimbangan kompetensi antarwilayah dapat teratasi. Keterbatasan sumber daya manusia terutama terlihat dari minimnya durasi pelatihan. Ibu Anne dari Dinas PPKB menjelaskan bahwa pelatihan hanya berlangsung satu hari sehingga materi tidak dapat dibahas secara mendalam. Kesulitan ini juga dirasakan oleh kader seperti Ibu Gina yang mengaku masih kurang percaya diri ketika harus menghadapi situasi tertentu di lapangan.

Keterbatasan pendampingan juga memperlihatkan bagaimana sumber daya manusia terkait erat dengan variabel disposisi. Di daerah dengan monitoring minim, kader harus mengandalkan inisiatif sendiri untuk menjaga kelangsungan kegiatan. Seperti dijelaskan kader Jatirejo, meskipun mereka sering kekurangan tenaga, kegiatan tetap dijalankan semaksimal mungkin. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari pelaksana, meskipun tidak seluruh wilayah memiliki dukungan yang sama. Perbedaan sumber daya antarwilayah juga terlihat jelas pada aspek pendanaan.

Di beberapa desa, dukungan dana desa sangat memungkinkan kegiatan Selantang berjalan lebih fleksibel dan lengkap, terutama untuk kebutuhan fasilitas seperti konsumsi, alat peraga, ataupun pengadaan media edukasi. Sebaliknya, beberapa kelurahan tidak memiliki anggaran khusus sehingga kegiatan sangat bergantung pada swadaya kader.



Dalam wawancara, Bu Sita dari Kelurahan Jatirejo menyampaikan bahwa kegiatan sering dijalankan menggunakan dana patungan. Ia mengatakan, “Di kelurahan tidak ada anggaran khusus, jadi kalau butuh tambahan biasanya kami patungan atau menyesuaikan kemampuan kami sendiri.”

Sementara itu, Desa Balongpacul memiliki dukungan dana desa sehingga kegiatan lebih mudah difasilitasi. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana struktur birokrasi desa dan kelurahan berpengaruh pada pola pendanaan. Desa memiliki kewenangan pengelolaan anggaran yang lebih fleksibel dibanding kelurahan, sehingga kemampuan dalam menyediakan fasilitas program lebih kuat.

Kesenjangan sumber daya juga terjadi pada peserta lansia. Lansia di wilayah kelurahan cenderung lebih antusias, memiliki kehadiran stabil, dan dapat memahami materi dengan lebih cepat. Bu Sita menegaskan bahwa lansia Jatirejo “lebih cepat menangkap materi dan semangatnya tinggi.” Situasi ini berbeda dengan desa yang memiliki tantangan lebih besar.

Berdasarkan wawancara dengan Bu Suparmi, kader Desa Balongpacul, banyak lansia desa memiliki pendidikan rendah dan masih bekerja, sehingga sulit menghadiri kegiatan secara konsisten. Ia menjelaskan, “Di desa itu banyak lansia yang belum sekolah, jadi harus dijelaskan berkali-kali. Semangatnya juga berbeda dengan kelurahan.” Temuan ini menunjukkan bahwa disposisi peserta menjadi faktor penting karena motivasi, kemampuan belajar, dan kesiapan fisik lansia sangat menentukan keberhasilan proses pemberdayaan.

Sementara itu, fasilitas fisik yang digunakan dalam Program Selantang juga masih terbatas. Kegiatan biasanya memanfaatkan balai desa, posyandu lansia, atau ruang serbaguna yang

telah tersedia, tanpa penyesuaian khusus yang benar-benar ramah lansia. Kader sering mengatur ulang ruang kegiatan agar lebih nyaman, seperti menata kursi atau menggelar tikar untuk sesi senam dan diskusi. Keterbatasan fasilitas ini memperlihatkan bagaimana sumber daya berhubungan langsung dengan variabel struktural, di mana birokrasi belum menyediakan dukungan ruang dan sarana secara optimal. Kondisi ini serupa dengan temuan penelitian sebelumnya (Sembodo, 2021) yang menjelaskan bahwa program lansia sering bergantung pada sumber daya lokal dan kreativitas pelaksana.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa sumber daya dalam Program Selantang di Kecamatan Nganjuk tidak dapat dilihat sebagai unsur yang berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan variabel komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Keterbatasan SDM pelaksana dapat tertutupi ketika komunikasi berjalan jelas dan konsisten. Perbedaan pendanaan antara desa dan kelurahan menggambarkan bagaimana struktur birokrasi mempengaruhi kemampuan wilayah dalam mendukung kegiatan. Sementara itu, motivasi dan kemampuan lansia sebagai sasaran kebijakan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan. Dengan demikian, peningkatan sumber daya tidak hanya membutuhkan pelatihan dan dukungan anggaran, tetapi juga memerlukan penguatan komunikasi antar pelaksana, komitmen kader yang terus dipelihara, serta koordinasi birokrasi yang lebih merata di seluruh wilayah Kecamatan Nganjuk.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam keberhasilan implementasi Program Selantang di Kecamatan Nganjuk. Mengacu pada pemikiran George C. Edward III



(Situmorang, 2016), kebijakan yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa pelaksana yang memiliki komitmen, kemauan, dan rasa tanggung jawab terhadap program. Sikap positif pelaksana tidak hanya mendukung kelancaran teknis kegiatan, tetapi juga memperkuat koordinasi antar lini sebagaimana ditegaskan (Handoyo, 2010). Dalam program sosial seperti Selantang, sikap empati dan kepedulian sosial pelaksana pun berperan besar terhadap kualitas layanan bagi lansia, sebagaimana dijelaskan (Fitriani & Febrieta, 2024).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa disposisi pelaksana Program Selantang di Kecamatan Nganjuk berada pada kategori sangat baik. Para koordinator, kader, dan fasilitator menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjalankan kegiatan secara rutin meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, sarana, serta jumlah penyuluh yang terbatas. Seorang kader Kelurahan Jatirejo, Bu Sita, menjelaskan, “Kami tetap jalan meskipun kelurahan tidak ada dukungan dana khusus. Yang penting kegiatan untuk lansia tetap hidup.”

Hal ini menunjukkan motivasi intrinsik yang kuat, di mana pelaksana tetap bekerja bukan karena dorongan administratif, tetapi karena rasa pengabdian kepada masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Windani & Rosdiana, 2025) yang mendapati bahwa komitmen pelaksana menjadi penentu keberlanjutan program Selantang di wilayah lain. Sikap pelaksana yang penuh kepedulian juga terlihat dari cara mereka menyesuaikan materi dan pendampingan bagi lansia dengan kemampuan peserta masing-masing.

Tingginya komitmen pelaksana juga berkaitan dengan pengaturan sumber daya manusia dalam struktur birokrasi Program Selantang. Edward III menekankan bahwa struktur birokrasi yang jelas akan memudahkan alur implementasi kebijakan. Dalam Program

Selantang, pembagian peran antar pelaksana sudah berjalan cukup efektif. Koordinator bertanggung jawab pada penyusunan jadwal dan pemantauan kegiatan, fasilitator mempersiapkan materi pembelajaran, sedangkan kader mendampingi lansia secara langsung. Pembagian tugas yang jelas ini membuat proses implementasi lebih tertata dan mengurangi potensi tumpang tindih kerja. Dukungan administratif juga mulai menguat melalui surat edaran Sekretaris Daerah yang memberikan legitimasi atas pelibatan narasumber dalam kegiatan Selantang.

Namun, terdapat perbedaan kondisi antar wilayah pelaksana yang memengaruhi ketersediaan dan optimalisasi sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa desa memiliki dukungan pendanaan dari pemerintah desa, sedangkan beberapa kelurahan tidak mendapatkan dukungan serupa. Perbedaan ini berdampak pada kelancaran kegiatan. Bu Sita, kader di Kelurahan Jatirejo, mengungkapkan, “Di kelurahan tidak selalu ada anggaran, jadi kami harus pintar-pintar mengatur. Berbeda dengan desa yang kadang dapat dari dana desa.” Sebaliknya, di Desa Balong Pacul, pendanaan lebih stabil, tetapi tantangan justru muncul dari sisi kualitas sumber daya manusia peserta. Menurut Bu Suparmi, kader desa tersebut, “Di desa itu yang ikut Selantang semangatnya naik turun. Kadang banyak yang tidak hadir karena merasa sudah tua dan capek.” Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan finansial di desa lebih memadai, motivasi lansia untuk mengikuti kegiatan belum sekuat di wilayah kelurahan. Di beberapa kelurahan seperti Begadung dan Keramat, peserta lansia justru memiliki tingkat antusiasme yang lebih tinggi, yang dinilai pelaksana sangat membantu keberlangsungan kegiatan.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh



aspek struktural seperti dukungan dana, tetapi juga oleh faktor non-struktural seperti karakteristik sosial peserta. Ketika lansia memiliki motivasi tinggi, keterbatasan anggaran dapat tertutupi oleh partisipasi aktif. Sebaliknya, meskipun dukungan dana memadai, rendahnya motivasi peserta dapat menghambat kelancaran kegiatan. Temuan ini memperkuat pandangan Edward III bahwa keberhasilan implementasi adalah hasil dari interaksi antar variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada konteks ini, disposisi pelaksana menjadi faktor yang mampu menyeimbangkan kekurangan pada variabel lainnya.

Sehingga dapat disimpulkan implementasi Program Selantang di Kecamatan Nganjuk menunjukkan bahwa disposisi pelaksana merupakan kekuatan utama yang mendukung keberlanjutan kegiatan, sementara pengaturan SDM dalam birokrasi memberikan struktur yang jelas bagi pelaksana untuk bekerja secara terarah. Namun, ketimpangan pendanaan antar wilayah serta variasi semangat peserta lansia menjadi tantangan yang perlu ditangani melalui strategi pembinaan yang lebih merata dan pendekatan sosial yang lebih adaptif. Kombinasi komitmen pelaksana, dukungan kelembagaan, serta penguatan motivasi peserta menjadi kunci penting untuk memastikan Program Selantang berjalan efektif di seluruh wilayah Kecamatan Nganjuk.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan Program Selantang. Menurut Edward III, efektivitas pelaksanaan kebijakan tergantung pada seberapa baik struktur birokrasi mendukung koordinasi, pembagian tugas, dan konsistensi pelaksanaan program. Struktur yang terlalu kaku bisa menimbulkan hambatan dan memperlambat

proses, sementara struktur yang fleksibel dan terdesentralisasi membuat pelaksana lebih mudah menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan. Penelitian sebelumnya juga menekankan pentingnya SOP yang jelas dan komunikasi yang lancar agar semua pelaksana dapat bekerja selaras.

Dalam program ini, SOP menjadi pedoman utama agar kegiatan berjalan teratur. Juknis BKKBN mengatur tahapan mulai dari perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi. Pelaksana di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa mengikuti pedoman ini, mulai dari pembukaan, penyampaian materi, pendampingan, hingga penutupan. Meski demikian, tetap ada penyesuaian agar kegiatan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan lansia. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa pelaksana menyesuaikan cara kerja di lapangan agar tujuan program tercapai tanpa mengabaikan prosedur. Penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa SOP yang jelas membantu koordinasi dan mengurangi kesalahan, tetapi pelaksana tetap perlu menyesuaikan prosedur dengan kondisi nyata di masyarakat.

Selain SOP, fragmentasi birokrasi juga penting. Fragmentasi menunjukkan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi di antara unit pelaksana. Di Nganjuk, Dinas PPKB di tingkat kabupaten mengatur perencanaan, pengawasan, dan pedoman kegiatan. Koordinator di kecamatan menangani teknis dan distribusi kegiatan, sementara kader mendampingi lansia langsung. Pembagian tugas ini membuat setiap tingkatan memiliki peran spesifik yang saling melengkapi. Komunikasi formal maupun informal, seperti rapat koordinasi, laporan kegiatan, dan pendampingan langsung, menjaga koordinasi antar level birokrasi.

Meski struktur cukup teratur, masih ada



kendala, terutama keterbatasan fasilitas dan dana. Dukungan antara desa dan kelurahan berbeda. Desa biasanya memiliki dana desa sehingga kegiatan lebih mudah dijalankan, sedangkan kelurahan sering mengandalkan swadaya kader. Kondisi ini membuat pelaksana di kelurahan harus lebih kreatif dan adaptif, sementara di desa kegiatan bisa berjalan lebih rutin.

Secara keseluruhan, struktur birokrasi Program Selantang di Kecamatan Nganjuk sudah cukup baik. SOP memberikan panduan jelas, fragmentasi yang terkontrol memungkinkan koordinasi efektif, dan fleksibilitas di lapangan membuat kegiatan tetap sesuai kebutuhan lansia. Perbedaan antara desa dan kelurahan menekankan pentingnya penyesuaian birokrasi dengan kondisi lokal, sehingga program tetap berjalan lancar dan tujuan kebijakan tercapai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Selantang di Kecamatan Nganjuk menunjukkan bahwa transformasi pembelajaran nonformal bagi lansia dipengaruhi oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif menjadi faktor penting agar kegiatan pembelajaran nonformal berjalan sesuai pedoman. Penyampaian informasi melalui juknis, SOP, rapat koordinasi, dan arahan langsung memungkinkan kader memahami alur kegiatan dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan lansia. Kualitas komunikasi yang baik membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan pemahaman peserta. Namun, distribusi informasi belum merata di seluruh wilayah

karena keterbatasan tenaga penyuluh, sehingga intensitas pendampingan masih perlu ditingkatkan.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia dan fasilitas memengaruhi kualitas pembelajaran. Kader yang telah mendapat pelatihan dasar mampu menjalankan pendampingan, meski keterbatasan waktu pelatihan menyebabkan kompetensi tidak sepenuhnya merata. Fasilitas yang digunakan sederhana, seperti balai desa atau posyandu, dan dukungan anggaran berbeda antara desa dan kelurahan. Desa yang memiliki dana desa dapat menjalankan kegiatan lebih lancar, sedangkan kelurahan cenderung mengandalkan swadaya kader. Perbedaan ini juga memengaruhi motivasi dan partisipasi lansia, sehingga penyesuaian strategi pembelajaran diperlukan.

3. Disposisi Pelaksana

Sikap dan komitmen pelaksana menjadi penentu utama keberhasilan program. Kader yang berdedikasi, memiliki empati, dan tanggung jawab sosial mampu mengatasi keterbatasan sarana dan anggaran, serta menjaga kelangsungan pembelajaran nonformal. Disposisi positif ini memastikan kegiatan tetap berjalan dan kualitas pendampingan bagi lansia tetap terjaga.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas mendukung koordinasi dan efektivitas implementasi. Penerapan SOP memberikan pedoman baku, sedangkan fragmentasi yang terkontrol memungkinkan setiap tingkatan birokrasi kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa menjalankan fungsi masing-masing secara efektif. Fleksibilitas di lapangan memungkinkan penyesuaian metode pembelajaran sesuai kondisi peserta, termasuk menanggapi perbedaan antara desa dan



kelurahan.

Secara keseluruhan, transformasi pembelajaran nonformal bagi lansia melalui Program Selantang berhasil karena adanya sinergi antara komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana yang positif, dan struktur birokrasi yang adaptif. Perbedaan kondisi desa dan kelurahan menunjukkan perlunya strategi lokal yang tepat agar seluruh lansia dapat mengikuti pembelajaran nonformal secara optimal, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan dan partisipasi lansia dapat tercapai. Isi kesimpulan memuat jawaban dari tujuan penelitian. Kesimpulan dibuat secara ringkas, dan jelas didasarkan pada hasil penelitian serta merekomendasikan pengembangan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2023). Bonus Demografi dan Visi Indonesia Emas 2045. *Badan Pusat Statistik*, 1–12. Retrieved from https://bigdata.bps.go.id/documents/datain/2023_01_2_Bonus_Demografi_dan_Visi_Indonesia_Emas_2045.pdf
- Boreel, M. S., Meigawati, D., & Amirulloh, M. R. (2022). Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kota Sukabum. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(3), 5377–5388.
- Daryanto, T. S., Agustin, D., & Pongtuluran, E. (2023). Peningkatan Kapasitas Manajerial dan Kompetensi Pedagogik Bagi Pengelola dan Fasilitator Sekolah Lansia Di DKI Jakarta. *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 5(1), 1133–1146. <https://doi.org/10.33541/cs.v5i1.4630>
- Fitriani, Y., & Febrieta, D. (2024). Menggapai Bahagia dan Sejahtera di Masa Tua: Implementasi Program Sekolah Lansia untuk Peningkatan Kualitas Hidup. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(4), 931–938. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v2i4.926>
- Handoyo, E. (2010). Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(3), 78–91.
- Kartika, I., Barmawi, F. H., & Yuningsih, N. (2024). VISA : Journal of Visions and Ideas Kepemimpinan Ideal di Era Milenial VISA : Journal of Visions and Ideas. *Visa*, 4(1), 104–113.
- Rahmad, B., Febriansyah, D., & Priambodo, B. (2024). Efektivitas Program Permakanaan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia Miskin di Kota Surabaya. 5(2). <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v5i2.9722>
- Sembodo, T. (2021). Upaya Pemberdayaan Masyarakat pada Lansia dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia. (December), 0–8. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Theodor-us-Sembodo/publication/357366037_Upaya_Pemberdayaan_Masyarakat_pada_Lansia_dalam_Pembangunan_Kesehatan_di_Indonesia_Community_Empowerment_Efforts_for_the_Elderly_in_Health_Development_in_Indonesia/links/61ca84b8
- Situmorang, C. H. (2016). Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt, M.Sc. *Social Security Development Institute (Ssdi)*, 324.
- Tuwu, D., & La Tarifu. (2023). Implementasi Program Posyandu Lansia Untuk Menjaga Kesehatan Lanjut Usia. *Journal Publicuho*, 6(1), 20–29. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.72>
- Windani, D. A., & Rosdiana, W. (2025). Implementasi Kebijakan Program SELANTANG (Sekolah Lansia Implementation of the “Sri Rejeki” SELANTANG (Resilient Elderly School) Program Policy in Babatan Village, Surabaya



City. *Inovant*, 4(2), 59–75.
Yuswantina, R., Vifta, R. L., & Susilo, J. (2019).
Program Pendampingankader Lanjut Usia
Melalui Kegiatan Bina Keluarga Lansia Di
Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat.

Indonesian Journal of ..., 1161. Retrieved
from
[https://jurnal.unw.ac.id/index.php/IJCE/article
e/view/214](https://jurnal.unw.ac.id/index.php/IJCE/article/view/214)

